



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA

JALAN LINTAS SUMBAWA, TALABIU, WOHA, BIMA-NTB
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipmbima@kkp.go.id

21 Oktober 2024

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.901/SKIPM.BIM/TU.210/X/2024

No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	LKJ Triwulan III Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal :

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

Kepala Stasiun KIPM Bima,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Jonison Petrus



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumbawa Talabiu, Woha, Bima, Nusa Tenggara Barat



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima atas kinerja pencapaian kerjanya pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Stasiun KIPM Bima untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat/publik. Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi publik dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target sasaran strategis dan target kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Semoga penyajian LKj Triwulan III Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima ini mampu menjadi pijakan dan bahan pertimbangan bagi segenap pegawai Stasiun KIPM Bima untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bima, 1 Oktober 2024
Kepala Stasiun KIPM Bima,



Jonison Petrus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 117.67 %.

Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bima. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 5 Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi target, sementara 9 Indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian dan sasaran capaian dari 14 (Empat belas) Indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5	10	120
		2 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1	-	-
		3 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5	1	120
		4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3	4	120
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84	94,93	105,49
		6 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1	-	-
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84	-	-
		8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-	-

9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-	-
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	100	120
11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76	-	-
12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-	-
13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-	-
14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-	-

Keterangan : Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

Terdapat 9 indikator kinerja yang belum tercapai target, untuk itu dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggungjawab selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi serta mengkomunikasikan program sesuai rencana yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan melaksanakan manajemen resiko, terutama untuk program kerja bersifat prioritas, sehingga resiko yang akan dihadapi dapat diproyeksi, dimitigasi, sehingga kesempatan pencapaian tujuan dan target kinerja menjadi lebih besar.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Realisasi anggaran belanja Stasiun KIPM Bima Triwulan III pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.944.485.103,00,- atau 69,15% dari Pagu DIPA sebesar Rp2.811.876.000,00,-. Persentase realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp3.821.381.868,00,- atau 71,80% dari Pagu DIPA sebesar Rp5.321.951.000,00,-. Dari segi persentase dan realisasi anggaran Tahun 2024 lebih rendah dari Tahun 2023. Dikarenakan adanya pengalihan anggaran yang sebagian besar diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia sebesar Rp2.130.942.000,00,-. Dari Pagu DIPA Awal Rp5.129.522.000,00,- dan juga dikarenakan pengalihan anggaran sebesar Rp294.704.000,00,- oleh BPPMHKP ke UPT lain semula Pagu DIPA sebesar Rp2.998.580.000,00,- menjadi Rp2.811.876.000,00,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 CAPAIAN KINERJA	6
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
BAB III PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	5
Tabel 2.1 Capaian Kinerja SKIPM Bima Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2.1 Target dan Realisasi IKS 1 Tahun 2024	9
Tabel 2.2.2 Target dan Realisasi IKS 2 Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2.3 Target dan Realisasi IKS 3 Tahun 2024.....	11
Tabel 2.2.4 Target dan Realisasi IKS 4 Tahun 2024.....	13
Tabel 2.2.5 Target dan Realisasi IKS 02.1 Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2.6 Target dan Realisasi IKS 02.2 Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2.7 Target dan Realisasi IKS 03.1 Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2.8 Target dan Realisasi IKS 03.2 Tahun 2024.....	19
Tabel 2.2.9 Target dan Realisasi IKS 03.3 Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2.10 Target dan Realisasi IKS 03.4 Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2.11 Target dan Realisasi IKS 03.5 Tahun 2024.....	23
Tabel 2.2.12 Target dan Realisasi IKS 03.6 Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2.13 Target dan Realisasi IKS 03.7 Tahun 2024.....	25
Tabel 2.2.14 Target dan Realisasi IKS 03.8 Tahun 2024.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	3
Gambar 1.2. Peta Strategis Stasiun KIPM Bima Tahun 2024	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil hayati ikan yang akan di Konsumsi manusia atau masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Bima dituntut untuk melaksanakan secara *prudent, transparan, akuntabel, efektif* dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Bima. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Bima. Selain memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Misi

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKIPM Bima mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bima menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan administrasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bima;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bima, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun KIPM Bima saat ini berjumlah 14 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 6 orang di kantor Stasiun KIPM Bima dan 1 orang di Wilayah Kerja Labuanbajo, yang dibantu oleh 7 tenaga kontrak. Distribusi pegawai tidak seimbang namun tetap harus membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1.1

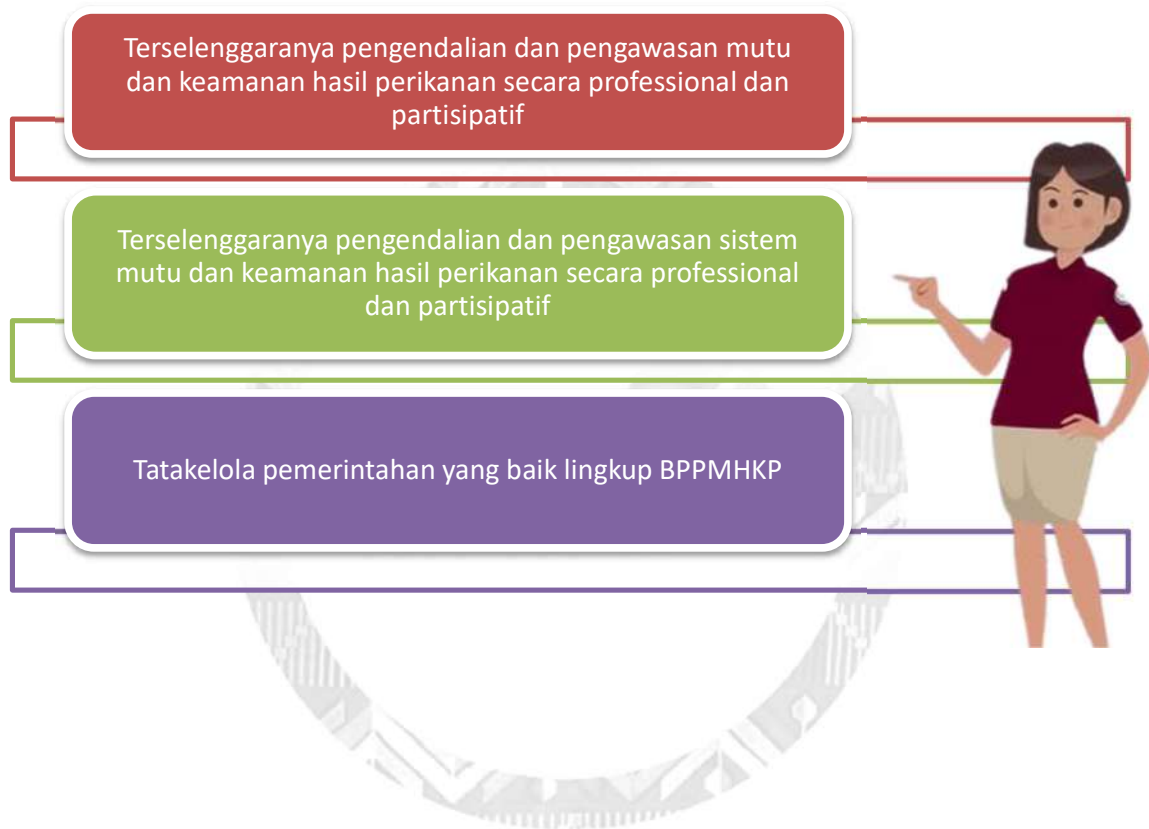
Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bima (SOTK sementara)

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Bima dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bima tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.2
Peta Strategis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima Tahun 2024



Tabel. 1.1
Penetapan Kinerja
Stasiun KIPM Bima Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84
		6	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80

Capaian Kinerja SKIPM Bima pada Tahun 2024
 seperti pada gambar
Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN TW III
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima (sertifikat)	5	10
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (UPI)	1	-
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Produk)	5	1
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima (UPI)	3	4
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima (nilai)	84	94,93
		6	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Lokasi)	1	-
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Bima (indeks)	84	-
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima (%)	100	-
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	100
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	93,76	-
		12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima (Nilai)	82	-
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima (%)	80	-

2.2 Analisis dan Evaluasi

Sebagai analisis dan evaluasi untuk Capaian kinerja pada Stasiun KIPM Bima meliputi 3 Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis 01. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKS.1 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pemasok/supplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pemasok/supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (standard sanitation operating procedure) dan (good manufacturing practices) serta menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pemasok/supplier.

Pada tahun 2024, kegiatan CPIB belum dilakukan kegiatan untuk mencapai target jumlah sertifikat yang dicapai. Berikut indikatornya :

Tabel 2.2.1
Target dan Realisasi IKS.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bima	5	10	120

IKS.2 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Sistem *traceability* merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan international. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri.



Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui verifikasi penerapan sistem ketelusuran hasil perikanan.

Pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bima menetapkan target jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* realisasi indikator ini adalah sebesar 2 UPI dari target 3 UPI yang sudah tercapai tahun 2024. Namun belum menerapkan sistem *traceability* karena indikator baru yang ada di lingkup UPT Stasiun KIPM Bima. Seperti ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 2.2.2
Target dan Realisasi IKS.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	-	-

IKS.3 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Terjaminnya keamanan hasil perikanan tergantung pada peranan dan tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas dan produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama serta konsumen. Sinergi ketiganya akan mewujudkan keamanan hasil perikanan. Salah satu regulasi adalah UU Perikanan No. 45 Tahun 2009 Pasal 20 yang berbunyi proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Permen KP No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Inspeksi penerapan HACCP dilakukan dengan tujuan Memberikan perlindungan konsumen terhadap Mutu dan Keamanan Pangan (Hasil Perikanan); Memberikan jaminan keamanan pangan dari hulu hingga hilir; serta Untuk dapat memenuhi persyaratan pasar internasional.

Target yang direncanakan pada tahun 2024 saat ini belum dapat dilakukan kegiatan, sehingga belum mencapai target realisasi dalam indikator pencapaiannya. Berikut indicator pencapaiannya :

Tabel 2.2.3
Target dan Realisasi IKS.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	5	1	120

IKS.4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (Sanitation Standard Operating Procedure).

Cara Pengolahan Ikan yang baik meliputi :

1. Seleksi bahan baku
2. Penanganan dan pengolahan
3. Penggunaan bahan tambahan
4. Bahan penolong
5. Bahan kimia
6. Pengemasan, dan
7. Penyimpanan

Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi :

1. Keamanan air es dan es
2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan
3. Pencegahan kontaminasi silang
4. Menjaga fasilitas pencuci tangan
5. Sanitasi dan toilet
6. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan
7. Pelabelan, penyimpanan dan penggunaan toksin yang benar

8. Pengawasan kondisi kesehatan dan pengendalian binatang pengganggu

Persyaratan Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

1. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Fotocopy izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa)
3. Fotocopy identitas pemohon
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir
6. Fotocopy akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan
7. Fotocopy perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun
8. Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif
9. Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan dan/atau penyimpanan
10. Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan prosedur Operasi Sanitasi Standar
11. Fotocopy Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu

Persyaratan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) ialah UPI mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan meng-upload semua dokumen persyaratan SKP ke dalam SKP Online dan pastikan alamat email yang disampaikan di SKP Online adalah alamat email resmi perusahaan, karena kami akan melakukan notifikasi apabila SKP sudah habis masa berlakunya.



Untuk kegiatan UPI pada tahun 2024 Triwulan III sudah dilakukan kegiatan, sehingga target pencapaiannya sudah terlaksana. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.4
Target dan Realisasi IKS.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bima	3	4	120

Sasaran Strategis 02. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKS.02.1 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima

Tingkat kepuasan masyarakat dapat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM BIMA) melakukan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 dengan responden seluruh pengguna jasa dan stakeholdernya. Hasil survei IKM Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja layanan 94,93 % dengan kinerja sangat baik (A).



Predikat Sangat Baik untuk hasil survei IKM lingkup Stasiun KIPM BIMA Triwulan III Tahun 2024 ini dapat dicapai dikarenakan meningkatnya kepatuhan responden dalam mengisi questioner Survey Kepuasan Masyarakat. Stasiun KIPM Bima tetap konsisten melakukan perubahan dan peningkatan pada setiap unsur pelayanan baik petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta sistem pelayanan yang dikemas melalui salah satu bentuk pelayanan yaitu "Pelayanan SIAP". Seluruh Pegawai lingkup Stasiun KIPM BIMA juga telah berkomitmen untuk melaksanakan "Pelayanan SIAP", sesuai dengan kebijakan, standard dan prosedur-prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan penandatanganan pakta integritas. Stasiun KIPM BIMA juga telah menerapkan beberapa sistem manajemen yang mengacu kepada standar internasional untuk mendukung peningkatan kinerja layanan dengan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017. Berikut pencapaian indikatornya :

Tabel 2.2.5

Target dan Realisasi IKS.02.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bima	84	94,93	105,49

IKS.02.2 Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Destructive fishing ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, strum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Beberapa contoh dari kegiatan destructive fishing yaitu penggunaan bom ikan, racun ikan, bubu (perangkap ikan), muroami, dan trawl di perairan dangkal. Selain itu, terjadi pula destructive fishing di perairan umum berupa penggunaan setrum ikan. Pembahasan destructive fishing dalam Rencana Aksi Nasional ini dibatasi hanya terhadap penggunaan bahan peledak, racun ikan, dan setrum ikan. Dasar pembatasan adalah ketiga jenis destructive fishing tersebut yang paling banyak ditemukan di beberapa wilayah perairan di Indonesia.



Destructive fishing biasanya yang paling banyak digunakan oleh nelayan tradisional adalah *destructive fishing* menggunakan bahan peledak. Nelayan tradisional sudah sering menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan-ikan karang, terutama di daerah pesisir pantai yang ada di sekitaran laut Sape dan Dompu. Saat ini bom ikan yang ada merupakan rakitan yang terdiri dari sumbu, pupuk, dan botol bir atau soda.



Namun untuk kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2024 belum dapat dilakukan karena masih dalam proses perencanaan. Terdapat 1 target yang akan dilaksanakan dan belum terealisasi pada tahun 2024 Triwulan III.

Tabel 2.2.6

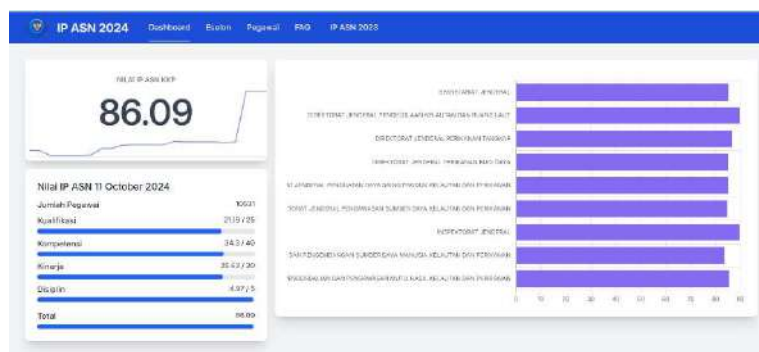
Target dan Realisasi IKS.02.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	Target	Realisasi	% Terhadap Target
Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	1	-	-

Sasaran Strategis 03. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN dilingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).



Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

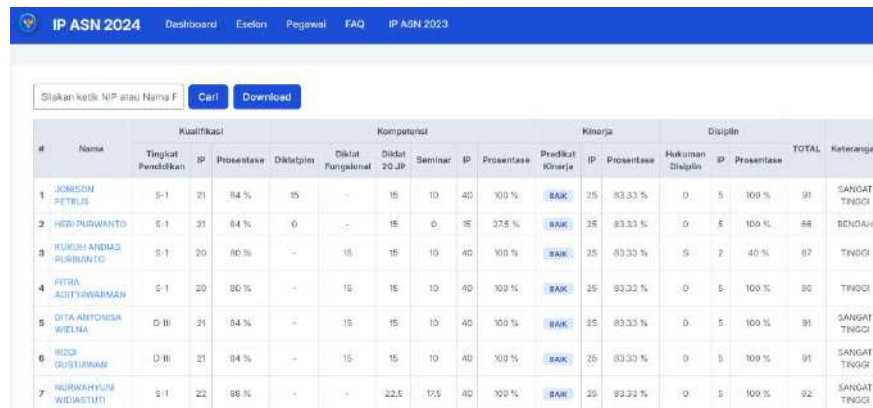
1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu/D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)

e. Pendidikan dibawah SLTA

3. Kompetensi

- a. Diukur dari indicator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir .
- b. Diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat.



#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi					Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan			
		Tingkat Pendidikan	IP	Presentase	Diklatpin	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Presentase	Predikat Kinerja	IP	Presentase			Hukuman Disiplin	IP	Presentase
1	JONSON PETRUS	S-1	31	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	HENDI PURWANTO	S-1	31	84 %	0	-	15	0	15	37,5 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	86	BENDAH
3	KUNSI ANDAS SUBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	5	7	40 %	87	TINGGI
4	FIRRA ADITHYAWANAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	DITA ANTONISA WIDINA	D III	31	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	HENDI GUSTAWAN	D III	31	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83,33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	HURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	22	98 %	-	-	22,5	15,5	40	100 %	BAIK	25	89,29 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI

Dari penghitungan semua komponen tersebut, berikut capaian Triwulan III atas indikator IP ASN Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.7
Target dan Realisasi IKS.03.1 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Indeks Profesionalitas ASN	84	-	-

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara (IP ASN) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima tahun 2024 telah tercapai dari target sebesar 84 belum tercapai di tahun 2024. Hal ini dapat di lihat pada system informasi kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan secara online.

IKS.03.2 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sector publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi dan Penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon IV KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024 adalah 85 (Kategori A/Memuaskan). Realisasi nilai AKIP dilakukan tahunan sehingga pada tahun 2024 belum tercapai.

Tabel 2.2.8
Target dan Realisasi IKS.03.2 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	85	-	-

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai AKIP pada tahun yang akan datang, yaitu :

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran Stasiun KIPM Bima;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak

4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Triwulan III tahun 2024, indikator Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Bima belum tercapai.

Tabel 2.2.9
Target dan Realisasi IKS.03.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Bima	100	-	-

IKS.03.4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator ini adalah menghitung persentase dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jendral sebagai APIP sebagai hasil temuan dari pengawasan/evaluasi, dan menghitung tindak lanjut dari satker dalam menuntaskan temuan/rekomendasi ini.

Pada tahun 2021 Stasiun KIPM Bima telah dievaluasi sebanyak 2 kali oleh Itjen KKP atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pekerjaan ini dievaluasi pada bulan September, kemudian dilakukan evaluasi Kembali di bulan Desember. Pekerjaan konstruksi menjadi perhatian karena adanya recofusing anggaran, yang membuat pekerjaan menjadi tidak bisa dibayarkan penuh pada tahun anggaran berjalan, namun dilakukan secara carry over.

Dari dua kali evaluasi oleh Itjen dikeluarkan 2 LHP dengan total terdapat 5 rekomendasi. Dari 5 rekomendasi tersebut, semua telah dilakukan tindak lanjut menjawab rekomendasi yang diberikan. Atas tercapainya 5 tindak lanjut atas rekomendasi ini, maka diperoleh capaian THLP sebesar 100%.

Namun pada tahun 2024, tidak melakukan pekerjaan konstruksi sehingga pada tahun tersebut tim pengawas dan pemeriksa tidak melakukan kunjungan di Stasiun KIPM Bima.

Tabel 2.2.10
Target dan Realisasi IKS.03.4 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Bima	80	100	120

IK.04.18 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA :

1. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM)
2. Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D)
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^3 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 20 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.2.11
Target dan Realisasi IK.03.5 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Tahun 2022		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bima	93,76	-	-

IK.04.19 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima

Nilai kinerja anggaran UPT Stasiun KIPM Bima adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bima didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

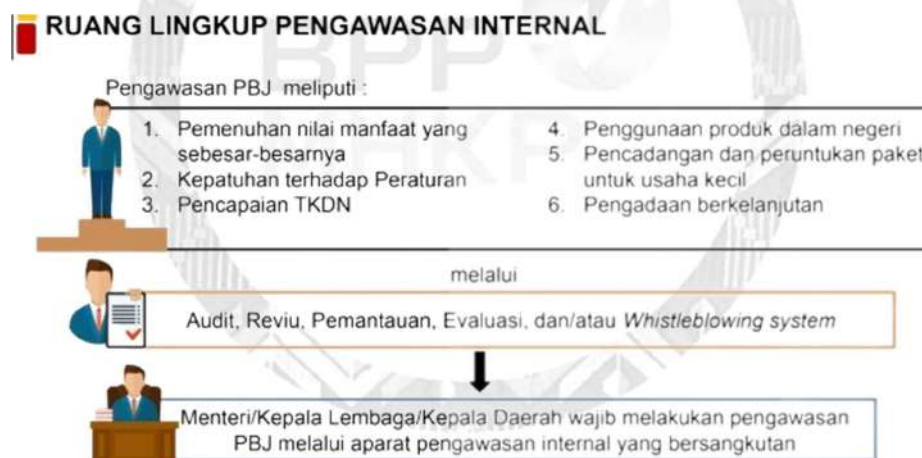
Kesalahan SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier dan ditolak oleh KPPN. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini di triwulan berikutnya, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan agar tidak tertolak oleh KPPN.

Tabel 2.2.12
Target dan Realisasi IK.03.6 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Bima	82	-	-

IK.04.20 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.



Dalam meningkatkan kepatuhan pengadaan barang dan/atau jasa pada lingkup Stasiun KIPM belum untuk tahun 2024 belum terealisasi sesuai target perencanaan, yaitu 80%. Realisasi terkendala dengan masih diblokirnya Backdrop ruang pelayanan serta Pengadaan tower dan tendon air. Berikut ulasan indikator pencapaian target realisasinya :

Tabel 2.2.13
Target dan Realisasi IK.03.7 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Bima	80	-	-

IK.04.21 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima

Realisasi tingkat kepatuhan tim pengelola BMN dapat dihitung setiap setahun sekali diakhir tahun 2024, pencapaiannya bisa sampai dengan 100%. Pada tahun 2024 pencapaian yang di targetkan adalah sekitar 80%. Kegiatan ini dapat dipengaruhi oleh peran aktif operator BMN dalam hal pelaporan asset yang dimiliki, serta pemanfaatannya untuk kegiatan Stasiun KIPM Bima. Apabila Operator BMN dan ASN lainnya turut serta aktif dalam melaporkan pemanfaatan asset BMN maka pemanfaatan asset BMN dapat lebih optimal dan tingkat kepatuhan dapat tercapai maksimal.

Namun di tahun 2024 tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup Stasiun KIPM Bima belum dilakukan kegiatannya. Berikut indikator pencapaiannya :

Tabel 2.2.14
Target dan Realisasi IK.03.8 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Dan Realisasi Triwulan III		
	% Target	% Realisasi	% Terhadap Target
Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Bima	80	-	-

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Bima tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Bima pada tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target Triwulan III dan target Renstra tahun 2022-2025 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Bima yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bima pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;
2. Meningkatkan pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten secara bertahap



LAMPIRAN

BPP
MHKP



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PELAKSANAAN KOORDINASI P2I
SKIPM BIMA
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif									
Nama IKU : IKS.1 Jumlah sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan (sertifikat)									
T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	TW1	TW2	SM.I	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	5	0	5	0	0	5	5	5	5
Realisasi	6	2	8	0	0	8	8	8	5
%Capaian	100%	20%	120%	-	-	-	-	120%	
Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit Suplier hasil inpeksi : TW 1,2,3,4 = Capaian selama TrW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4 SM I = Capaian TW 1 + Capaian TW 2 SM 2 = Capaian TW 3 + Capaian TW4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024									

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)		
a. Untuk pencapaian Sertifikasi CPIB Hasil Perikanan sudah sesuai target triwulan akan tetapi pelaksanaan sering terkendala kendala, kurangnya pemahaman penyusunan panduan CPIB b. Sampai dengan akhir TW II tahun 2024 Realisasi 120 %		
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)		
Realisasi mencapai 120% karena Suplier belum memahami Cara Menyusun panduan CPIB sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB, secara administrasi belum memenuhi persyaratan.		
Tindakan yang telah dilaksanakan		
Sosialisasi kepada setiap kepada Suplier tentang pentingnya CPIB		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Sosialisasi CPIB serta penyusunan panduan CPIB pada suplier	1. PKP2I/ Inspektur Mutu	1. Triwulan II Tahun 2024

Bima, 8 Juli 2024
Kepala


Jonison Petrus, S.St.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and manufacturing Practice" In The Suppliers
No. 007/ CPIB/30/VI/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Suplier : **Haeda**
The Supplier

Alamat : **DUSUN: SARANAE, DESA : LAJU, KECAMATAN :**
Address : **LANGGUDU, KABUPATEN : BIMA**

Jenis Produk : **SARGASSUM KERING**
Type of Product(s)

Tahapan Penanganan : **PENERIMAAN → PENDINGINAN → PENIMBANGAN**
Scope of Handling Step : **→ PENGEMASAN → PENYIMPANAN → PENGIRIMAN**

Klasifikasi : **CUKUP**
Classification

Tanggal Inspeksi : **05 JUNI 2024**
Date of Inpection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan GMP dan SSOP pada kegiatan penanganan ikan di suplier
Busines Operator has effectively fulfilled and implemented the requirement of GMP and SSOP on Fish Handling in The Supplier

Berlaku sampai : 10 JULI 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Bima
Issued in

Tanggal : 10 JULI 2024

On



Kepala UPT BPPMHKP Bima
Head of UPT Bima



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and manufacturing Practice" In The Suppliers
No. 008/ CPIB/30/VI/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Suplier : **BIAH**
The Supplier

Alamat : **DUSUN: SARANAE, DESA : LAJU, KECAMATAN :**
Address : **LANGGUDU, KABUPATEN : BIMA**

Jenis Produk : **SARGASSUM KERING**
Type of Product(s)

Tahapan Penanganan : **PENERIMAAN → PENDINGINAN → PENIMBANGAN**
Scope of Handling Step : **→ PENGEMASAN → PENYIMPANAN → PENGIRIMAN**

Klasifikasi : **CUKUP**
Classification

Tanggal Inspeksi : **05 JUNI 2024**
Date of Inpection

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan GMP dan SSOP pada kegiatan penanganan ikan di suplier
Busines Operator has effectively fulfilled and implemented the requirement of GMP and SSOP on Fish Handling in The Supplier

Berlaku sampai : 10 JULI 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Bima
Issued in

Tanggal : 10 JULI 2024



Kepala BPPMHKP Bima
Head of BPPMHKP Bima

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN III TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Nama IKU : IKS.02.2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Stasiun KIPM Bima (Produk)

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2025
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	0	-	-	1	-	-	-	-	
Realisasi	0	-	-	1	-	-	-	-	
%Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup hasil inpeksi, monev dan pemeliharaan sistem yang diterbitkan:

- TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
- Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2
- Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4
- Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- a. Untuk pencapaian Sertifikasi ruang lingkup HACCP Hasil Perikanan TW 3, target 1 UPRL / realisasi 1 UPRL
- b. Pada tahun 2024 TW 3 sudah dilakukan Inspeksi perpajakan UPRL (PT. Berkat Nisa Sura Bima) di Bulan Juli 2024,
- c. Pada tahun 2024 TW 3 belum dilakukan Monev HACCP CV. Labuan Bajo Fishery

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Monev HACCP UPRL baru akan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2024 (TW 4)

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi dan pendampingan kepada setiap UPI terkait Program Inspeksi dan pemeliharaan sistem Tahunan (Monev)

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
K3 terkait pelaksanaan program Sertifikasi HACCP tahun 2024, Pembentukan noreg Inspektur Mutu baru dalam rangka penguatan SDM	1. Ketua Tim Pengendalian Kesehatan Ikan	1. TW 3 tahun 2024

Bima, 14 Oktober 2024

Kepala



Jonison Petrus, S.St.Pi

**IKS.02.2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Stasiun KIPM
Bima (Produk) TW 3 Tahun 2024**

Bulan : Juli – September 2024 (Triwulan 3)

NO	Ruang Lingkup	Nama UPI/UPRL	Target Ruang Lingkup	Realisasi Ruang Lingkup	Realisasi TW 3 (%)
1	Rumput Laut Kering	PT. Berkat Nisa Sura Bima	1	1	100 %

Mengetahui :

Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus, S.St.Pi

Bima, 14 Oktober 2024

Ketua Tim Kerja Pengendalian

Fitra Adityawarman, S.St.Pi

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) PKP2I SKIPM BIMA
TRIWULAN 3 TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Nama IKU : IKS.02.4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) di UPT Stasiun KIPM Bima

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2025
	TW1	TW2	SM.1	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	-	-	-	1	-	-	-		
Realisasi	-	-	-	1	-	-	-		
%Capaian	-	-	-	100%	-	-	-		

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit upi hasil Surveilans penerapan HACCP:

TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian TW1 + Capaian TW2

Sm2 = Capaian TW3 + Capaian TW4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Untuk pencapaian UPI/UPRL yang konsisten menerapkan SJMKHP dengan menghitung UPI yang telah di Surveilans, pada TW 3 ada 13 UPI/UPRL yang di surveilans, pada TW 3 capaian 100%.
- Pada Tahun 2024 ada 3 UPI/UPRL yang harus dilakukan Surveilans, Satu UPRL belum ada proses produksi sehingga belum bisa dilakukan surveilans.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Dua UPI/UPRL yang dilakukan surveilans sesuai dengan ruang lingkupnya.
- Satu UPI belum melakukan proses produksi dikarenakan ketersediaan bahan baku dan kondisi perusahaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi dan pendampingan kepada setiap UPI/UPRL terkait Program Surveilans dan pemeliharaan sistem Tahunan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
K3 terkait pelaksanaan program Surveilans HACCP tahun 2024, pembentukan noreg Inspektur Mutu baru dalam Rangka Penguatan SDM	1. PKP2I	1. TW 3 th 2024

Bima, 14 Oktober 2024

Kepala



Jonison Petrus, S.St.Pi

**IKS. UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LINGKUP STASIUN KIPM BIMA TW 3 TAHUN 2024**

Bulan : Juli – September 2024 (Triwulan 3)

NO	Bulan	Nama UPI/UPRL	Ruang Lingkup	Tanggal Surveilans	Realisasi TW 1 (%)
1	Juli	-	-	-	-
2	Agustus	PT. Berkah Nisa Sura	Dried Seaweed	27 Agustus	100 %
3	September	-	-	-	-

Mengetahui :

Kepala Stasiun KIPM Bima



Jorisson Petrus, S.St.Pi

Bima, 14 Oktober 2024

Ketua Tim Kerja Pengendalian

Fitra Adityawarman, S.St.Pi

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) SKIPM BIMA
TRIWULAN III TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara Profesional dan Partisipatif									
Nama IKU : IKS.02.1 Jumlah sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan (sertifikat)									
T/R	Tahun 2023							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	TW1	TW2	SM.I	TW3	TW4	SM.2	Tahunan		
Target	5	0	5	0	0	0	5	5	5
Realisasi	6	2	8	2	0	0	10	10	5
%Capaian	110 %	20%	130%	20%	-	-	150 %	150 %	

Catatan Pengukuran di ukur dengan menghitung jumlah unit Suplier hasil inpeksi :

TW1,2,3,4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan
 Tw4 Sm I = Capaian TW1 + Capaian TW2 Sm2 = Capaian
 TW3 + Capaian TW4 Tahunan = Capaian di akhir tahun
 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Untuk pencapaian Sertifikasi CPIB Hasil Perikanan sudah sesuai target triwulan I akan tetapi pelaksanaan sering terkendala kendala, kurangnya pemahaman penyusunan panduan CPIB
- Sampai dengan akhir TW III tahun 2024 realisasi 150 %

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Realisasi mencapai 150% karena Suplier mulai paham mengenai perlunya penerapan CPIB, tetapi supplier masih belum mengerti cara Menyusun panduan CPIB sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB, secara administrasi belum memenuhi persyaratan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Sosialisasi kepada setiap kepada Suplier tentang pentingnya CPIB

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Sosialisasi CPIB serta penyusunan panduan CPIB pada suplier	1. Inspektur Mutu	1. Triwulan 3 Tahun 2024

Bima, 15 Oktober 2024

Kepala



Johnson Petrus, S.St.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and manufacturing Practice" In The Suppliers
No. 009/ CPIB/30/VIII/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Suplier
The Supplier

: **PT. SUMBAWA SEAFOOD NIAGA**

Alamat
Address

: **DUSUN: NCUNI, DESA : KWANGKO, KECAMATAN :
MANGGALEWA, KABUPATEN : DOMPU, NTB**

Jenis Produk
Type of Product(s)

: **IKAN PLAGIS BEKU**

Tahapan Penanganan
Scope of Handling Step

: **PENERIMAAN → SORTIR → PENIMBANGAN
→ PENGEMASAN → PEMBEKUN → PENGIRIMAN**

Klasifikasi
Classification

: **CUKUP**

Tanggal Inspeksi
Date of Inpection

: **20 AGUSTUS 2024**

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan GMP dan SSOP pada kegiatan penanganan ikan di
suplier

Busines Operator has effectively fulfilled and implemented the requirement of GMP and SSOP on
Fish Handling in The Supplier

Berlaku sampai : 26 AGUSTUS 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Bima
Issued in

Tanggal : 26 AGUSTUS 2024
On



Kepala UPT BPPMHIKP Bima
Head of UPT Bima



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER

Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practice" In The Suppliers

No. 010/ CPIB/30/VIII/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Suplier
The Supplier

: **PT. SUMBAWA SEAFOOD NIAGA**

Alamat
Address

: **DUSUN: NCUNI, DESA : KWANGKO, KECAMATAN :
MANGGALEWA, KABUPATEN : DOMPU, NTB**

Jenis Produk
Type of Product(s)

: **IKAN TUNA BEKU**

Tahapan Penanganan
Scope of Handling Step

: **PENERIMAAN → SORTIR → PENIMBANGAN
→ PENGEMASAN → PEMBEKUN → PENGIRIMAN**

Klasifikasi
Classification

: **CUKUP**

Tanggal Inspeksi
Date of Inpection

: **20 AGUSTUS 2024**

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan GMP dan SSOP pada kegiatan penanganan ikan di
suplier

Busines Operator has effectively fulfilled and implemented the requirement of GMP and SSOP on
Fish Handling in The Supplier

Berlaku sampai : 26 AGUSTUS 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Bima
Issued in

Tanggal : 26 AGUSTUS 2024
On



Kepala UPT BPPMHKP Bima
Head of UPT Bima

**REALISASI CAPAIAN IKK NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP LAYANAN BKIPM
UPT KIPM : STASIUN KIPM BIMA
TAHUN 2024**

Bulan : Juli s.d September 2024 (Periode 3)

No	UPT	Tahun	Periode	Jumlah Responden	Jumlah Responden yang Mengisi	Nilai	Kinerja
1	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima	2024	3	52	52	94,93	Sangat Baik (A)

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Bima



Jonison Petrus

Bima, 1 Oktober 2024
Penanggung Jawab IKK,

Dita Antonisa Wielna



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Triwulan III SKIPM BIMA

JULI - SEPTEMBER



KATA PENGANTAR

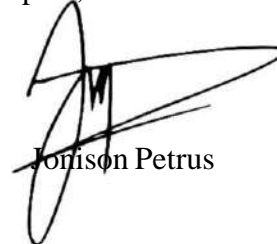
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima berkomitmen secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelum menentukan Langkah yang diambil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu diketahui terlebih dahulu urutan berdasarkan urgensi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Data Survei Kepuasan Masyarakat yang berasal dari pengguna jasa sebagai responden dapat menjadi penentu arah pelaksanaan peningkatan pelayanan publik Stasiun KIPM Bima.

Stasiun KIPM Bima selaku penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap beberapa unsur pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan yang diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat ini, kami sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan bahwa hasil pengukuran kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap kinerja unit pelayanan Stasiun KIPM Bima, serta penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu untuk ditingkatkan dan unsur pelayanan yang perlu dipertahankan. Stasiun KIPM Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan "**SIAP**" (*Senyum, Ikhlas, Aman, Profesional*) untuk menuju pelayanan prima.

Bima, 01 Oktober 2024

Kepala,



Jonison Petrus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Pengertian Umum	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Manfaat	3
1.6. Hasil yang Diharapkan.....	3

BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup.....	4
2.2. Tahapan Kegiatan Survey	4
2.2.1. Persiapan	4
2.2.2. Pengumpulan Data.....	5
2.2.3. Pengolahan dan Analisa Data	6
2.2.4. Penyusunan Laporan	7

BAB III. HASIL SURVEI

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan	8
3.2. Reviu Hasil Survei dengan Hasil Pada Periode Sebelumnya.....	10
3.3. Unsur-unsur yang Perlu Dilakukan Tindakan Perbaikan.....	11

BAB IV. TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan Perbaikan yang Perlu Dilakukan	12
4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan.....	12

BAB V. KESIMPULAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stasiun KIPM Bima sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang memiliki beberapa tugas pokok yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik berkaitan dengan jasa pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan seluruh instansi pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Stasiun KIPM Bima selaku penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta berkewajiban melakukan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu tolak ukur kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan elemen penting dalam evaluasi kinerja unit pelayanan terhadap pelaksanaan program inovasi pelayanan publik Stasiun KIPM Bima, sebagai alat kendali untuk mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat, demi memenuhi harapan pengguna jasa lingkup Stasiun KIPM Bima.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/63/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

1.3. Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
- b. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- c. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survei terhadap kinerja Unit Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima dimaksudkan untuk mengetahui gambaran / pendapat masyarakat (pengguna jasa) tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima.

Adapun tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja dan mutu unit pelayanan Stasiun KIPM Bima, serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat / pengguna jasa terhadap kinerja unit pelayanan Stasiun KIPM Bima.

1.5. Manfaat

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Mendapatkan data tentang kelemahan dan kekuatan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengetahui tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan melalui pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil untuk melakukan perbaikan.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima.
5. Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang ingin dicapai pada Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat ke depannya.

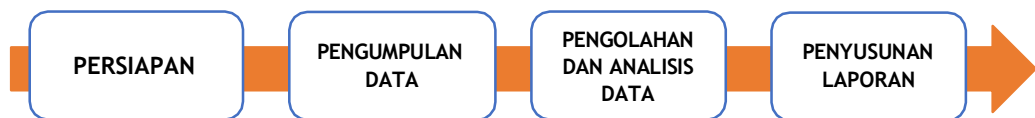
II. METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Bima terkait dengan unsur-unsur kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kantor Stasiun KIPM Bima. Survei Kepuasan Masyarakat ini melibatkan pengguna jasa layanan pada Stasiun KIPM Bima selama Triwulan IV (bulan Oktober s.d. Desember 2023) sebagai responden.

2.2. Tahapan Kegiatan Survei

Metode pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik Stasiun KIPM Bima adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Survei

2.2.1. Persiapan

a) Penyiapan Bahan

1. Kuisisioner

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan kuisisioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

2. Bagian dari Kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

Bagian I : Identitas responden berisi data responden dan tanggal pelaksanaan survei

Bagian II : Penilaian penerima pelayanan yang memuat pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bagian III : Mutu pelayanan publik yang memuat saran perbaikan dari responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

3. Bentuk Jawaban

Jawaban yang diberikan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan berupa nilai dari masing-masing unsur yang terdapat pada kuisioner.

Adapun penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Nilai 1, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
2. Nilai 2, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Nilai 3, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Nilai 4, apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

b) Kriteria Responden

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Bima.

c) Metode Survei

Metode survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/38> dengan tampilan berupa kuisioner yang pilihan nilai kesesuaiannya dapat diisi secara langsung oleh pengguna jasa. Pengisian dapat melalui handphone maupun PC / laptop.

2.2.2. Pengumpulan Data

Responden dipersilahkan mengisi kuisioner pada link yang diberikan oleh petugas pelayanan setelah pengguna layanan selesai menerima layanan. Pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat periode triwulan IV dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2023. Hasil data yang telah diinput oleh pengguna jasa diunduh melalui website <https://ptsp.kkp.go.id/skm> untuk diolah setelah periode berakhir.

2.2.3. Pengolahan dan Analisa Data

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

- ✓ Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket / tahapan layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.
- ✓ Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- ✓ Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- ✓ Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Data mentah yang sudah terkumpul selama survei diperiksa lebih lanjut untuk memastikan data lengkap sehingga proses analisa data dapat dilakukan. Data dianalisa secara deskriptif analitik. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus berikut :

Bobot Nilai Rata-Rata = Total Perolehan Nilai : Total Unsur Penilaian

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = (Total Nilai per Unsur : Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang

Analisa data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisa yang diperoleh di lapangan dengan tujuan agar

data yang disajikan mempunyai makna atau arti sehingga dapat mengetahui hasil penelitian yang dilakukan. Dalam kegiatan survei ini, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara

25 – 100, maka hasil penilaian yang tersebut dalam pengolahan data dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

2.2.4. Penyusunan Laporan

Nilai survei yang tertera pada website SKM merupakan hasil penilaian pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan Stasiun KIPM Bima. Hasil tersebut disusun dalam bentuk laporan sebagai dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Bima. Pengolahan dan analisa data akan menjadi bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

III. HASIL SURVEI

Hasil rekapitulasi kuisisioner yang telah diisi oleh responden pada periode triwulan II tahun 2024 didapatkan sebanyak 1 (Satu) responden. Jumlah responden berdasarkan beberapa kategori disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Usia, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Responden		Jumlah
Berdasarkan Usia	25 – 45 tahun	30
	46 – 60 tahun	20
	>60 tahun	2
Berdasarkan Pendidikan	SD	1
	SMP	0
	SMA	22
	D3	1
	S1	28
Berdasarkan Jenis kelamin	Laki-laki	41
	Perempuan	11

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan sebagai responden melalui sarana elektronik dengan pertanyaan yang meliputi 9 unsur, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Fasilitas pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (sertifikat)
6. Biaya/Tarif
7. Kompetensi pelaksana.
8. Perilaku pelaksana
9. Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut pengaduan

Tabel 2 Nilai Rata-rata (NRR) Triwulan III Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia diunit kerja kami	3,66
U2	Apakah sistem, mekanisme, prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	3,55
U3	Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan	3,65
U4	Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan	3,57
U5	Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan	3,72
U6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan	3,50
U7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan	3,39
U8	Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik	3,55
U9	Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia	3,72
IKM Unit Pelayanan		94,93

Berdasarkan data hasil pengukuran di atas, dapat diketahui bahwa nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima adalah **94,93**. Sesuai dengan kategorisasi mutu pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima Periode Triwulan III Tahun 2024 masuk dalam kategori interval 88,31 – 100,00 dapat dikatakan mutu pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka seluruh unsur pelayanan di atas harus tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan kembali khususnya unsur-unsur yang memiliki nilai rendah. Hasil Survei Periode Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima termasuk kategori **Sangat Baik** dengan perolehan nilai sebesar **94,93**.
- b. Unsur pelayanan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah kepuasan masyarakat

terhadap Unsur : Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan dan Unsur : Bagaimana fasilitas pelayanan tersedia, yakni 3,72.

- c. Unsur pelayanan yang memiliki nilai paling rendah dari keseluruhan unsur layanan yang ditetapkan adalah unsur yang menanyakan “Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan”, yakni sebesar 3,39.
- d. Semua unsur pada Triwulan I mengalami penurunan dari periode sebelumnya (Triwulan IV tahun 2023). Sehingga SKIPM Bima berupaya meningkatkan pelayanan publik sehingga pada Triwulan berikutnya diharapkan terjadi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Keseluruhan unsur layanan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**, namun tetap membutuhkan perhatian untuk terus ditingkatkan mengikuti kemajuan zaman, dengan menetapkan unsur yang memiliki nilai terendah sebagai prioritas utama.

3.2. Review Hasil Survei dengan Hasil pada Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil Survei, Nilai Rata-rata pada periode Triwulan II tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Nilai Rata-rata (NRR) Triwulan I Tahun 2024 Stasiun KIPM Bima

No. Unsur	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia di unit kerja kami	3,00
U2	Apakah sistem, mekanisme, prosedur pelayanan yang tersedia mudah dipahami	3,00
U3	Apakah waktu pelayanan sesuai dengan janji Layanan	3,00
U4	Bagaimana kejelasan informasi tentang biaya/tarif jasa layanan	3,00
U5	Apakah produk pelayanan yang diberikan dan diterima telah sesuai dengan ketentuan	3,00
U6	Bagaimana kompetensi personil dalam memberikan pelayanan	3,00
U7	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan	3,00
U8	Apakah penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan atau keluhan pelanggan telah dilaksanakan dengan baik	3,00
U9	Bagaimana fasilitas pelayanan yang tersedia	3,00
IKM Unit Pelayanan		75,00

Hasil Survei periode sebelumnya (Periode triwulan II Tahun 2024) adalah :

Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima termasuk kategori **Kurang Baik** sebesar 75,00.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Bima periode Triwulan II tahun 2024 sebesar 75,00 dengan kriteria **Kurang Baik**, kemudian pada Periode Triwulan III tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 19,93 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 94,93 dengan kriteria **Sangat Baik**.

3.3. Unsur-unsur yang Perlu Dilakukan Tindakan Perbaikan

Pada Unsur “Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan”, yakni sebesar 3,39 Walaupun mengalami kenaikan dari TW. II, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan.

IV. TINDAKAN PERBAIKAN

4.1. Uraian Tindakan Perbaikan yang perlu dilakukan

Pada Unsur “Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan”, yakni sebesar 3,39 Walaupun mengalami kenaikan dari TW. II, tetapi unsur tersebut adalah nilai yang paling rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa.

4.2. Jadwal Waktu Tindakan Perbaikan

Rencana tindak lanjut perbaikan SKM adalah sebagai berikut :

No	Unsur Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan	Waktu	Penanggung jawab
1	unsur “Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan”	Melakukan Inhouse training terhadap petugas pelayanan bagaimana cara memberikan pelayanan PRIMA kepada pengguna jasa	1 hari	Ketua Tim Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

V. KESIMPULAN

1. Secara umum pelayanan publik pada Periode Triwulan III tahun 2024 di Stasiun KIPM Bima berdasarkan nilai dari 9 unsur pelayanan memperoleh nilai sebesar **94,93** termasuk dalam kategori dengan kinerja unit pelayanan “**Sangat Baik**”.
2. Untuk meningkatkan pelayanan di lingkup Stasiun KIPM Bima maka perlu dilakukan kajian lanjutan dan tindakan perbaikan secara terus menerus terutama terkait dengan peningkatan kompetensi, konsistensi dan komitmen pegawai/petugas pelayanan terhadap penyelenggaran Pelayanan “**SIAP**” untuk meningkatkan mutu layanan publik Stasiun KIPM Bima demi tercapainya kepuasan pelanggan.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan III
Tahun : 2024

Uraian IK/IKU	TARGET 2024			REALISASI		
	Tahunan	Semester I	Triwulan III	Semester I	Triwulan III	Tahunan
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bima	86	81	86	89	86.86	-

Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan III



Bima, 1 Oktober 2024
Penanggungjawab Indikator Kinerja,
Kepala Urusan Umum

Heri Purwanto

SS IP ASN

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

STASIUN KIPM BIMA [Cari](#)

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM BIMA	7	20.86	83.44 %	36.43	91.07 %	25	83.33 %	4.57	91.4 %	86.86	TINGGI

< >

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

Silakan ketik NIP atau Nama f [Cari](#) [Download](#)

#	Nama	Kualifikasi				Kompetensi				Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP			Prosentase
1	JONISON PETRUS	S-1	21	84 %	15	-	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
2	HERI PURWANTO	S-1	21	84 %	0	-	15	0	15	37.5 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	66	RENDAH
3	KUKUH ANDIAS PURBIANTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	5	2	40 %	87	TINGGI
4	FITRA ADITYAWARMAN	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	DITA ANTONISA WIELNA	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	RIZQI GUSTIAWAN	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	NURWAHYUNI WIDIASTUTI	S-1	22	88 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	92	SANGAT TINGGI

< >

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan III
Tahun : 2024

Uraian IK/IKU	TARGET 2024			REALISASI		
	Tahunan	Semester I	Triwulan III	Semester I	Triwulan III	Tahunan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bima	93,76	83	93,76	98,23	97.30	-

Uraian Capaian Indikator : Realisasi telah mencapai Target pada Triwulan III



Bima, 1 Oktober 2024
Penanggungjawab Indikator Kinerja,
Kepala Urusan Umum

Heri Purwanto



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	071	032	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Nilai	100.00	87.21	98.79	0.00	0.00	100.00	100.00	77.84	80%	0.00	97.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.08	19.76	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.61		99.40				100.00				

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bima

Nama Unit Kerja : Stasiun KIPM Bima
Periode Laporan : Triwulan III
Tahun : 2024

No	Instansi Pemeriksa/Pengawasan	LHP	Tanggal LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Tuntas Ditindaklanjuti
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor (outstanding Kontrak 2022) di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (SKIPM) Bima Provinsi NTB	9 November 2021	2	2
2	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Tahun 2021 Stasiun KIPM Bima	3 Januari 2022	3	3
3	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Reviu Dokumen untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan Perikanan Tahun 2021 di Stasiun KIPM Bima	27 Februari 2022	8	8

4	Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Reviu Penyelesaian Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Maret 2022	3	3
JUMLAH				16	16
CAPAIAN IKU ini				100%	
$\text{Perhitungan IKU} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Telah Tuntas Ditindak Lanjuti}} \times 100\% = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$					

Uraian Capaian Indikator : Semua hasil pengawasan telah di tindak lanjuti

Mengetahui.
Kepala Stasiun KIPM Bima



Johnson Petrus

Bima, 1 Oktober 2024
Penanggungjawab Indikator Kegiatan

Heri Purwanto

